



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERKEMBANGAN PERSIAPAN PELAKSANAAN HAJI 1444 H/ 2023 M

Nur Sholikhah Putri Suni
Analisis Legislatif Ahli Pertama
nur.suni@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Persiapan haji 1444 H/2023 saat ini hampir selesai menjelang diberangkatnya kloter pertama pada tanggal 24 Mei 2023. Pemerintah memiliki peran penting dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran dan keselamatan jemaah haji. Persiapan yang dilakukan pemerintah antara lain: *pertama*, penyusunan kebijakan. Pemerintah menetapkan kebijakan terkait kuota jemaah haji, prosedur pendaftaran, biaya haji, serta persyaratan administrasi lainnya. Kebijakan ini disusun berdasarkan aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas haji di tingkat nasional dan internasional. Terkait jumlah kuota jemaah haji, tahun ini kembali penuh seperti sebelum masa pandemi Covid-19 dimana jemaah haji kategori lansia menjadi prioritas pemerintah. Jumlah kuota haji tahun 2023 untuk Indonesia adalah sebanyak 221.000 orang dengan rincian 203.320 orang untuk jemaah haji reguler dan 17.680 orang untuk jemaah haji khusus. Kuota tersebut sudah 100% terpenuhi dan sudah siap untuk mulai diberangkatkan ke tanah suci mulai tanggal 24 Mei 2023. Tidak hanya itu, Indonesia ternyata juga mendapatkan kuota tambahan sebanyak 8.000 jemaah. Meskipun tambahan kuota menjadi angin segar untuk calon jemaah haji yang sedang menunggu antrian, namun sayangnya penggunaan kuota tersebut belum ditentukan untuk kriteria calon jemaah haji yang mana. Dalam penambahan kuota tersebut diharapkan untuk segera diurus sehingga tidak terbuang sia-sia seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, penambahan kuota diharapkan dapat didistribusikan secara merata ke semua daerah. Sedangkan dari sisi biaya haji, jemaah haji yang akan berangkat sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 hingga jumat 19 Mei 2023.

Kedua, persiapan infrastruktur. Pemerintah melakukan persiapan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung perjalanan jemaah haji serta menyediakan fasilitas akomodasi yang memadai di Mekah dan Madinah. Menjelang keberangkatan, persiapan seperti kontrak penerbangan, penyediaan akomodasi, konsumsi, serta transportasi selama di sana saat ini sudah mencapai 100%.

Ketiga, pelayanan kesehatan. Pemerintah bekerja sama dengan Lembaga Kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan kepada jemaah haji meliputi pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan, penyediaan fasilitas medis di tanah suci, dan pengawasan terhadap penyakit menular serta penanganan darurat. Terkait hal tersebut, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan Emergency Medical Team (EMT) untuk penanganan kegawatdaruratan medis penyelenggaraan haji 2023. Hal ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. EMT disiagakan untuk memberikan pelayanan kesehatan di 5 (lima) sektor daerah kerja Madinah dan 11 sektor daerah kerja Makkah yang berdekatan dengan pondokan jemaah haji sehingga memudahkan akses jemaah haji kepada pelayanan kesehatan. Dengan sinergi tersebut, diharapkan upaya penanganan kegawatdaruratan medis dapat dilaksanakan lebih optimal.

Keempat, pendidikan dan bimbingan. Pemerintah menyelenggarakan program pendidikan dan bimbingan bagi jemaah haji untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tata cara ibadah haji, aturan dan tata tertib, serta persiapan fisik dan mental yang diperlukan. Beberapa daerah sudah menjalankan manasik haji massal sebelum pemberangkatan haji.

Kelima, koordinasi dengan pemerintah Saudi Arabia. Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah Saudi Arabia untuk koordinasi dalam hal pemberian visa, prosedur keimigrasian, serta keamanan. Dalam hal ini komunikasi yang baik dan koordinasi yang efektif antara kedua pemerintah dipandang penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan haji. Untuk saat ini pemrosesan visa menjelang keberangkatan sudah mencapai 90%.

Keenam, pengawasan dan perlindungan jemaah. Pemerintah bertanggung jawab dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, termasuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan jemaah. Hal ini meliputi pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan haji, pemantauan kepatuhan terhadap aturan, serta penanganan jika terjadi masalah atau kejadian darurat.

Hal tersebut di atas merupakan upaya persiapan pelaksanaan ibadah haji. Hal ini perlu terus dilakukan secara cermat supaya tidak terulang kembali kesalahan dan kelemahan pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, persiapan diperlukan untuk mewujudkan optimalisasi pelayanan bagi jemaah haji agar mendapatkan ketenangan dalam beribadah.

Atensi DPR

Menjelang diberangkatnya jemaah haji 1444 H/ 2023 M, pemerintah perlu merinci kembali persiapan terkait pelaksanaannya. Dalam hal ini, Komisi VIII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu:

- Mengawasi kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan haji;
- Memastikan pemerintah dalam hal persiapan pelaksanaan haji seperti pengurusan visa, akomodasi, transportasi, penanganan kesehatan, kesiapan petugas mencapai 100% sebelum hari keberangkatan;
- Memastikan pelaksanaan haji berjalan dengan lancar. Pengawasan pelaksanaan juga dimaksud untuk mendapatkan data dan fakta riil di lapangan terkait permasalahan yang dihadapi oleh para jemaah haji Indonesia sehingga pelaksanaan haji tahun 1444 H/ 2023 M dapat berjalan lebih optimal;
- Memastikan pemerintah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah haji.

Sumber

detik.com, 17 Mei 2023;

kompas.com, 18 & 19 Mei 2023;

nasional.kontan.co.id, 19 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.